

## TINJAUAN PERKEMBANGAN REGIONAL DAN GLOBAL

### **Dominasi Kompetisi Ketimbang Kerja Sama**

*Alexandra Retno Wulan*

#### PENGANTAR,

Dinamika Hubungan Internasional pada kuartal ketiga tahun 2013 masih menunjukkan dua pola tradisional antara kompetisi dan kerja sama. Tulisan berikut menggambarkan beberapa peristiwa dalam lingkup hubungan internasional selama periode Juni–September 2013. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi ilustrasi bagaimana lingkungan strategik Indonesia, baik di tingkat regional maupun internasional, masih diwarnai dengan pola kompetisi yang dapat mengarah kepada konflik, dan pola kerja sama untuk membangun perdamaian.

Setidaknya ada tiga peristiwa dalam hubungan internasional selama periode kuartal ketiga tahun 2013 yang memiliki dampak cukup signifikan bagi Indonesia. Pertama, peristiwa di tingkat kawasan Asia Tenggara, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Bandar Seri Begawan. Peristiwa kedua di tingkat kawasan Timur Tengah, terutama krisis di Mesir dan Suriah yang membawa dampak cukup berpengaruh secara global. Peristiwa ketiga adalah pertemuan antara dua kekuatan utama dunia, yaitu Amerika Serikat dan China.

## PERTEMUAN MENTERI LUAR NEGERI ASEAN

Pertemuan rutin tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN kembali diadakan pada tanggal 27 Juni hingga 2 Juli 2013 yang lalu<sup>1</sup>. Pertemuan ini adalah rangkaian pertemuan Para Menlu yang terdiri dari Pertemuan tingkat ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting), Forum Kawasan ASEAN (ASEAN Regional Forum) dan Pertemuan Menteri Luar Negeri kawasan Asia Timur. Setidaknya terdapat beberapa isu penting di kawasan yang sepatutnya menjadi agenda dalam pertemuan ini, antara lain adalah persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan di kawasan Asia Tenggara, kelanjutan traktat kawasan bebas senjata nuklir untuk kawasan Asia Tenggara (South East Asian Nuclear Weapons Free Zone – SEANWFZ) dan masalah krisis Semenanjung Korea. Beberapa negara juga berusaha memunculkan agenda pembahasan sengketa Laut China Selatan yang sepanjang tahun 2012 hingga awal tahun 2013 menunjukkan eskalasi konflik yang cukup signifikan.

Dalam pembahasan persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi dan menerapkan Traktat Polusi Kabut Asap Lintas Negara (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution - ATHP) yang sudah dibuka untuk ratifikasi sejak tahun 2002. Traktat tersebut secara normatif bertujuan untuk menghentikan kabut asap lintas negara akibat kebakaran hutan. Traktat tersebut pada dasarnya berusaha untuk memonitor, memberikan penilaian (*assessment*), melakukan pencegahan serta mempersiapkan negara-negara penandatangan dalam menghadapi polusi asap yang selama ini terjadi karena kebakaran hutan dan perusakan lingkungan hidup<sup>2</sup>. Traktat ini juga mensyaratkan pembentukan pusat koordinasi ASEAN untuk kontrol polusi asap lintas negara serta adanya pusat monitoring nasional dan otoritas yang berkompeten di masing-masing negara.

<sup>1</sup> "Pertemuan Rutin ASEAN Dimulai: AS akan Usung Isu Sengketa Laut China Selatan", *Kompas*, 29 Juni 2013.

<sup>2</sup> ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, dapat diakses di [http://haze.asean.org/?wptb\\_d1=32](http://haze.asean.org/?wptb_d1=32).

Selain itu, traktat tersebut juga menyebutkan kerja sama dalam tingkatan yang lebih teknis menyangkut persiapan negara dalam pencegahan dan kerja sama riset ilmiah tentang polusi asap. Traktat ini juga memandatkan adanya dana yang secara khusus dialokasikan untuk kebutuhan ASEAN dalam menangani persoalan polusi kabut lintas negara. Pada pertemuan kedua (COP II) di tahun 2007, negara-negara ASEAN sepakat mengumpulkan dana awal sebesar USD 500,000 sebagai modalitas implementasi pembentukan pusat ASEAN dalam penanggulangan polusi asap lintas negara di kawasan Asia Tenggara<sup>3</sup>. Traktat ATHP yang pada dasarnya mengatur tentang pencegahan dan monitoring mengandung banyak konsekuensi politik, terutama bagi Indonesia. ATHP juga memiliki potensi membatasi pertumbuhan industri yang selama ini mengandalkan pembukaan lahan di Sumatera dan Kalimantan sehingga Indonesia akan memiliki dampak ekonomis dari ratifikasi ATHP.

Sementara itu, secara tradisional, kebakaran hutan selalu dilihat sebagai salah satu bentuk dari bencana alami (*natural disaster*), namun sejak akhir periode 90-an, analisis ilmiah yang dilakukan oleh beberapa pihak mengindikasikan bencana kebakaran hutan diperparah oleh adanya aktivitas pembukaan lahan hutan untuk ladang kelapa sawit dengan metode pembakaran, sehingga kebakaran hutan menjadi tidak terkontrol dan bertambah parah. Setidaknya, beberapa perusahaan yang berasal dari Singapura dan Malaysia ikut diduga menjalankan metode pembakaran hutan ini. Perusahaan pertama adalah Perkebunan Sime Darby. Perkebunan itu adalah bagian dari konglomerasi Sime Darby yang dipercaya memiliki pekerja mencapai 100 ribu di lebih dari 20 negara dengan nilai perusahaan mencapai 56,7 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp176.624.336.020.325,7<sup>4</sup>.

Perusahaan lainnya adalah Kuala Lumpur Kepong (KLK), PT Multi Gambut Industri yang merupakan anak perusahaan dari Lembaga Tabung Haji Malaysia serta perusahaan Singapura, Wilmar

<sup>3</sup> Kesepakatan ini adalah hasil dari pertemuan pertemuan ASEAN tingkat menteri membahas tentang polusi asap lintas negara di Bandar Seri Begawan, berita dapat diakses di <http://www.bt.com.bn/node/1354/print>.

<sup>4</sup> Dengan asumsi Rp3.114 per ringgit, berita dapat dibaca di <http://news.okezone.com/read/2013/06/26/411/827668/3-perusahaan-malaysia-diduga-pembakar-hutan-sumatera>.

International Ltd dan Cargil Inc<sup>5</sup>. Perusahaan KLK besar karena usaha kelapa sawit, industri sumber daya alam dan properti. Menurut perkiraan, perusahaan KLK memiliki nilai pasar mencapai 22,5 miliar ringgit Malaysia atau setara Rp70 triliun<sup>6</sup>.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di bawah tekanan negara-negara tetangga secara tegas menyatakan bahwa sebaiknya tidak ada yang saling menyalahkan, namun Menteri Natalegawa menegaskan bahwa fokus untuk memadamkan kebakaran hutan adalah prioritas utama dari Indonesia<sup>7</sup>. Menteri Natalegawa juga menegaskan, ada komunikasi dan pertukaran informasi antara Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara yang secara signifikan mengalami kerugian dari persoalan kebakaran hutan dan polusi asap ini. Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Balthasar Kambuaya dalam pertemuan di Kuala Lumpur menyatakan bahwa Indonesia telah memulai kembali proses ratifikasi AHP dan secara optimis melihat kemungkinan tahun depan dapat disepakati oleh parlemen<sup>8</sup>.

Langkah ini dipandang sebagai langkah positif yang dilakukan oleh Indonesia. Walaupun demikian, AHP masih mengandung potensi implikasi negatif bagi Indonesia, terutama secara politik karena AHP membuka kemungkinan negara lain untuk mencampuri kebijakan domestik Indonesia dalam konteks pencegahan polusi asap. Namun kerugian polusi asap juga tidak dapat dinegasikan, baik bagi Indonesia maupun negara-negara tetangga. Singapura mengklaim mengalami kenaikan indeks polusi udara mencapai angka 400 dan kerugian ekonomi sekitar \$ 1 miliar per minggu selama bencana asap di tahun 2013 ini<sup>9</sup>. Walaupun tidak ada hitungan resmi, namun Indonesia juga mengalami kerugian besar, terutama warga di sekitar

<sup>5</sup> <http://international.okezone.com/read/2013/06/20/411/825165/ini-perusahaan-yang-diduga-bakar-hutan-sumatera>.

<sup>6</sup> <http://news.okezone.com/read/2013/06/26/411/827668/3-perusahaan-malaysia-diduga-pembakar-hutan-sumatera>.

<sup>7</sup> *The Jakarta Post*, "RI dodges haze blame game", edisi cetak 20 Juni 2013.

<sup>8</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/07/130717\\_indonesia\\_asap.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130717_indonesia_asap.shtml).

<sup>9</sup> <http://www.themalaysianinsider.com/sideviews/article/governing-the-risk-of-haze-and-asean-diplomacy-jonatan-a-lassa>.

wilayah kebakaran serta kerugian ekonomi lain yang disebabkan oleh adanya kebakaran dan asap.

Oleh karena itu, tampaknya pendekatan penyelesaian persoalan asap tidak lagi hanya difokuskan kepada tekanan ratifikasi ATHP oleh Indonesia, namun juga harus melalui manajemen penanganan bencana secara regional. Setidaknya apabila bencana kebakaran bisa dalam waktu singkat diatasi melalui kerja sama regional sebelum Indonesia meratifikasi ATHP, maka efek lanjut dari kebakaran tersebut tidak akan menjadi berlarut larut, dan dengan demikian dampak kerugian juga dapat dikurangi.

Pembahasan lain dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN juga dilakukan untuk persoalan sengketa Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario kembali membawa isu Laut China Selatan dalam pertemuan rutin di Bandar Seri Begawan. Menteri del Rosario menegaskan kekhawatiran Filipina terhadap peningkatan kehadiran militer China di kawasan sengketa Laut China Selatan. Dalam pertemuan tersebut, kesepuluh negara ASEAN berusaha meyakinkan China untuk memulai proses pembahasan Kode Tata Berperilaku (Code of Conduct – COC) yang jika berlaku akan mengikat secara hukum. Negara-negara ASEAN berharap bahwa proses pembahasan COC dapat dimulai pada tahun ini juga, walaupun Menteri Natalegawa juga yakin bahwa proses pembahasan COC tidaklah mudah karena tidak ada satu negarapun yang mau mempertaruhkan situasi damai dan kestabilan yang sudah tercipta selama ini<sup>10</sup>. Dengan pertimbangan tersebut, maka cukup jelas jika China masih terkesan berhati-hati dan bahkan ragu-ragu untuk melanjutkan pembahasan COC, walaupun China juga ikut mengusulkan pembentukan kelompok ahli (Eminent Persons Group-EPG) untuk membahas COC lebih jauh.

Beberapa isu lain di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur adalah persiapan Myanmar menjadi Ketua ASEAN tahun 2014 dan persoalan nuklir Korea Utara. Apabila persiapan Myanmar menjadi Ketua ASEAN tahun 2014 diapresiasi banyak pihak, perkembangan

---

<sup>10</sup> "Filipina Kembali Serang China: Indonesia Didesak Segera Ratifikasi Traktat Polusi Lintas Negara", *Kompas*, 1 Juli 2013.

di Korea Utara, terutama menyangkut adanya indikasi kemungkinan pengaktifan senjata nuklir Korea Utara menunjukkan kemunduran stabilitas keamanan di kawasan.

Dalam konteks persiapan Myanmar menjadi Ketua ASEAN 2014, Myanmar menegaskan bahwa ada tiga fokus substansial yang akan disampaikan. Ketiga fokus tersebut adalah (1) membangun ASEAN yang berfokus pada rakyat (*people-centred ASEAN*), (2) pembahasan mengenai perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan (3) pembahasan mengenai pekerja migran (*migrant workers*)<sup>11</sup>. Pembangunan infrastruktur di Myanmar juga dikembangkan sebagai bagian dari persiapan menjadi Ketua ASEAN 2014. Namun, banyak pihak masih meragukan tidak hanya kemampuan mengorganisasi pertemuan-pertemuan selama Myanmar menjadi Ketua ASEAN 2014 nanti, tapi juga apakah Myanmar dapat memastikan isu-isu strategik sekaligus sensitif seperti sengketa Laut China Selatan tetap dalam agenda pembahasan, mengingat selama ini Myanmar cukup dekat dan tergantung kepada China.

Sedangkan dalam persoalan nuklir Korea Utara, 27 Menteri Luar Negeri yang tergabung dalam Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum - ARF*) sepakat mendesak Korea Utara untuk melakukan proses denuklirisasi. Namun, dalam forum yang kini adalah satu satunya forum dialog keamanan regional yang masih diikuti oleh Korea Utara, terutama setelah Pembicaraan Enam Pihak (*Six Party Talks*) terhenti di tahun 2009, Korea Utara kembali menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mempertahankan program senjata nuklir sampai Amerika Serikat mengurangi sikap permusuhan dan merevitalisasi kebijakan-kebijakan yang menyulitkan Korea Utara. Dalam forum ini, China yang selama ini diyakini mendukung kebijakan pemerintah Korea Utara, tampaknya juga menunjukkan indikasi dukungan terhadap tekanan regional untuk proses denuklirisasi Korea Utara. Munculnya China sebagai kekuatan baru di kawasan, menuntut peran China untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan untuk kepentingan China di masa mendatang.

---

<sup>11</sup> "Myanmar assures its ready to host ASEAN 2014", *The Jakarta Post*, 17 Juni 2013.

## KRISIS MESIR DAN SURIAH: TANTANGAN MUSIM SEMI ARAB

Rangkaian transisi politik yang dikenal dengan musim semi Arab (*Arab Spring*) sejak 2011 masih terus terjadi hingga saat ini. Transisi politik di Mesir sempat mereda setelah Hosni Mubarak diturunkan oleh kekuatan militer di Mesir, namun kembali mengalami eskalasi krisis pada tahun 2013 ini. Mohammad Mursi yang didukung oleh kelompok Ikhwanul Muslimin terpilih sebagai Presiden Mesir menggantikan Mubarak. Akan tetapi, sejak politik Mesir masih terpolarisasi dan kebijakan Presiden Mursi yang memberikan banyak hak istimewa bagi kelompok Ikhwanul Muslimin, membuatnya tidak lagi dipandang sebagai presiden yang mewakili suara rakyat Mesir, yang berjuang di lapangan Tahrir ketika menurunkan Mubarak<sup>12</sup>. Kondisi tersebut membuat militer Mesir, yang secara tradisional selalu mendominasi kehidupan bernegara Mesir melakukan upaya “koreksi” terhadap dinamika politik di bawah kepemimpinan Mursi. Jenderal Abdul Fatah Al-Sisi sebagai pimpinan Militer Mesir secara sepihak mengultimatum Mursi dan kemudian menurunkan Presiden Mursi secara paksa pada 3 Juli 2013<sup>13</sup>.

Sejak Presiden Mursi diturunkan dan dipenjarakan oleh militer Mesir, pendukungnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin menggelar aksi di lapangan Tahrir. Perpecahan politik Mesir bereskalasi bahkan konflik antar pendukung dan penentang Presiden Mursi saling menyerang dan korban jiwa juga berjatuhan<sup>14</sup>. Walaupun kelompok Ikhwanul Muslimin selama 15 bulan pemerintahan Presiden Mursi mendominasi kelompok lain di Mesir bahkan menjalankan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan kelompok lain, termasuk kelompok Islam di luar ikhwanul muslimin, kelompok Kristen koptik dan kelompok perempuan, namun pendukung Presiden Mursi tersebut menyatakan bahwa tindakan Militer Mesir di bawah Jenderal Al-Sisi merusak prinsip demokrasi yang mulai tercipta di Mesir karena Presiden

<sup>12</sup> <http://edition.cnn.com/2013/07/30/opinion/ghitis-egypt-arab-spring/index.html>.

<sup>13</sup> <http://www.reuters.com/article/2013/08/23/us-egypt-protests-idUSBRE97M0DW20130823>

<sup>14</sup> *ibid.*

Mursi adalah presiden yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip demokrasi<sup>15</sup>.

Dunia internasional juga tampaknya kesulitan menentukan sikap dalam menghadapi perkembangan politik di Mesir. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, memutuskan untuk menunda (tanpa membatalkan) beberapa bantuan militernya termasuk menunda latihan militer bersama Amerika Serikat dengan Mesir serta menunda pengiriman beberapa pesawat F-16 dari Amerika Serikat untuk Mesir<sup>16</sup>. Walaupun demikian, sikap Amerika Serikat masih dinilai tidak tegas terhadap pelanggaran demokrasi yang dilakukan oleh Militer Mesir. Beberapa alasan Amerika Serikat tidak bisa bertindak lebih keras terhadap militer Mesir terutama karena Amerika Serikat membutuhkan Mesir berkaitan dengan keleluasaan wilayah udara apabila pesawat militer Amerika Serikat bergerak ke Afghanistan atau wilayah lain di kawasan tersebut. Selain itu, Mesir merupakan wilayah penting bagi kapal perang Amerika Serikat yang melalui Terusan Suez menuju ke Teluk Persia. Rusaknya hubungan Amerika Serikat dan Mesir dapat membawa konsekuensi negatif bagi usaha Amerika Serikat untuk meningkatkan penginderaan di daerah Libya dan Israel untuk mencegah terorisme dan penyelundupan senjata<sup>17</sup>. Karena nilai strategis Mesir terhadap Amerika Serikat inilah maka Pemerintahan Obama hanya dapat menyerukan supaya Mesir secepat mungkin mengembalikan demokrasi dalam kehidupan politik dan bernegara di Mesir. Perkembangan terakhir di Mesir adalah dibebaskannya Mubarak dari penjara dan beberapa pejabat di masa pemerintahan Mubarak kini kembali menjalankan pemerintahan yang dipasang oleh Jenderal Al-Sisi.

Sementara itu, kondisi di Suriah juga tidak membaik. Rejim Bashar al-Assad secara terbuka semakin menekan kelompok yang menginginkan adanya perubahan rezim di Suriah yang bergerak seiring dengan transisi politik di kawasan selama musim semi Arab (Arab Spring). Presiden Bashar al-Assad menjadi presiden Suriah setelah menggantikan ayahnya Hafiz al-Assad, keluarga al-Assad

<sup>15</sup> <http://www.theguardian.com/world/2013/jul/03/mohamed-morsi-egypt-second-revolution>.

<sup>16</sup> <http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-us-egypt-20130823,0,4353000.story>.

<sup>17</sup> *ibid*.

telah memimpin Suriah selama kira kira 40 tahun. Pemerintahan al-Assad menanggapi permintaan pergantian rezim yang dipicu oleh fenomena serupa di negara lain di kawasan dengan kekerasan. Rezim al-Assad diklaim melakukan penangkapan hingga pembunuhan aktivis yang terlibat dalam pergerakan perubahan<sup>18</sup>.

Pada tanggal 21 Agustus 2013, rezim al-Assad juga mengindikasikan penggunaan senjata kimia terhadap penduduk sipil dalam usahanya mempertahankan kekuasaan dan menghalangi gerakan perubahan rezim di Suriah<sup>19</sup>. Selama ini dunia internasional terkesan membiarkan krisis politik yang mengarah pada perang saudara di Suriah telah menimbulkan banyak korban jiwa dan arus pengungsian ke negara-negara tetangga. Walaupun beberapa negara berusaha mengupayakan damai melalui Perserikatan Bangsa Bangsa untuk dapat mengeluarkan resolusi untuk melakukan intervensi, namun Rusia dan China secara tegas menolak dan mengeluarkan hak vetonya sehingga tidak dicapai kesepakatan internasional untuk intervensi. Akan tetapi, adanya indikasi penggunaan senjata kimia ini tampaknya akan merubah sikap dunia internasional terhadap masalah Suriah.

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mengeluarkan opsi untuk intervensi militer di Suriah setelah adanya indikasi bahwa rezim al-Assad menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri, terutama dalam serangan tanggal 21 Agustus 2013. Walaupun demikian, Presiden Obama tidaklah terburu-buru memutuskan dan belum maju ke depan parlemen Amerika Serikat untuk meminta persetujuan bahkan Presiden Obama masih terkesan bimbang dan hati-hati untuk melanjutkan rencana intervensi militer. Sebelum proses intervensi militer matang dan akan dijalankan, negara-negara lain juga masih memiliki keraguan untuk mendukung rencana Amerika Serikat tersebut.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang memang menentang penggunaan opsi intervensi militer terhadap Suriah, memberikan alternatif pilihan kebijakan bagi dunia internasional, sebelum Ame-

---

<sup>18</sup> [http://www.nytimes.com/2013/08/28/world/middleeast/the-conflict-in-syria.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/08/28/world/middleeast/the-conflict-in-syria.html?_r=0)

<sup>19</sup> <http://www.nytimes.com/2013/08/27/world/middleeast/blasts-in-the-night-a-smell-and-a-flood-of-syrian-victims.html>.

rika Serikat mematangkan rencana intervensinya. Presiden Putin yang memang memiliki sejarah aliansi panjang bersama Presiden al-Assad, menulis pada sebuah artikel di surat kabar Amerika Serikat, *the New York Times*<sup>20</sup>, bahwa serangan militer ke Suriah akan memunculkan potensi serangan terorisme terhadap Amerika Serikat dan oleh sebab itu harus dihindari. Selain itu Presiden Putin juga menawarkan opsi bahwa dunia internasional bisa membujuk pemerintah Suriah di bawah Presiden al-Assad untuk melaporkan dan menyerahkan senjata-senjata kimianya kepada dunia internasional, sehingga dapat dipastikan bahwa senjata kimia tidak digunakan di Suriah. Proposal Presiden Putin ini juga cukup ditanggapi positif oleh Presiden al-Assad sehingga untuk sementara dapat menghalangi penggunaan opsi intervensi militer terhadap Suriah. Namun, tantangan Presiden Putin untuk memastikan Suriah berniat baik dan mengikuti proposalnya adalah memastikan bahwa Presiden al-Assad tidak memindahkan fasilitas penyimpanan dan pengembangan senjata kimianya ke tempat lain, sebelum fasilitas tersebut dapat dikontrol oleh dunia internasional<sup>21</sup> dan dunia internasional dapat memastikan bahwa senjata kimia tidak digunakan oleh pihak manapun di Suriah ataupun di bagian dunia lainnya.

#### PERTEMUAN PRESIDEN BARACK OBAMA- PRESIDEN XI JIN PING

Salah satu peristiwa yang dipandang penting dalam hubungan internasional adalah pertemuan informal musim panas pertama antara Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dengan Presiden China, Xi Jin Ping. Pertemuan, ini terutama dipandang penting karena baik Amerika Serikat maupun China merupakan kekuatan dunia paling berpengaruh saat ini di tingkat global. Selain itu, pertemuan ini penting sebagai pertemuan pertama Presiden Xi yang terpilih menjadi Presiden China menggantikan Presiden Hu Jin Tao awal bulan Maret 2013 ini dan Presiden Obama juga baru terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat di akhir tahun 2012.

<sup>20</sup> [http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?hp&\\_r=1&](http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?hp&_r=1&).

<sup>21</sup> [http://www.nytimes.com/2013/09/13/world/middleeast/united-states-and-russia-far-apart-as-kerry-arrives-in-geneva-for-syria-talks.html?pagewanted=2&\\_r=0&ref=syria](http://www.nytimes.com/2013/09/13/world/middleeast/united-states-and-russia-far-apart-as-kerry-arrives-in-geneva-for-syria-talks.html?pagewanted=2&_r=0&ref=syria).

Langkah diplomasi awal antara dua pemimpin dari kekuatan terbesar dunia pada saat ini, Amerika Serikat dan China memberikan harapan positif pada besarnya potensi kerja sama dibandingkan kompetisi antara keduanya di masa depan. Namun, pertemuan informal ini tidaklah menghasilkan kesepakatan- kesepakatan yang mengikat. Beberapa agenda utama yang dibahas dalam pertemuan informal ini antara lain stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik dengan ancaman nuklir Korea Utara, *cyberspionage*, isu perubahan iklim<sup>22</sup>.

Pertemuan yang diadakan selama dua hari di bulan Juni 2013 ini tidak menghasilkan kesepakatan resmi. Namun, kedua pemimpin negara mengklaim bahwa diantara keduanya telah terbangun pemahaman bersama mengenai beberapa hal. *Pertama*, dalam konteks perubahan iklim, pertemuan ini membahas bagaimana kedua negara ini merupakan negara berkontribusi paling banyak terhadap proses pemanasan global melalui proses efek rumah kaca. Dengan demikian, melalui pembicaraan ini, kedua negara membangun kesamaan pandangan bahwa kedua negara harus mengurangi emisi karbon dari gas *hydrofluorocarbons* (HFCs) yang banyak terdapat pada lemari pendingin dan pendingin ruangan<sup>23</sup>. Pada periode sebelumnya, posisi China dalam masalah pengurangan karbon didominasi penolakan karena dapat memberikan dampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi China. Sementara, posisi Amerika Serikat adalah menunggu keputusan China, yang artinya Amerika Serikat baru akan mengurangi emisi karbonnya apabila China bersedia mengurangi emisi karbonnya.

*Kedua*, dalam konteks stabilitas keamanan yang potensial terganggu apabila Korea Utara memiliki senjata nuklir, kedua negara juga berhasil membangun kesamaan pemahaman. China mengindikasikan penolakannya terhadap proliferasi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara membicarakan tentang potensi gangguan keamanan di kawasan dengan adanya proliferasi nuklir. Berdasarkan kesamaan pemahaman tersebut maka kedua negara menyatakan keinginan, sekaligus komitmen keduanya

<sup>22</sup> [http://www.nytimes.com/2013/06/09/world/asia/obama-and-xi-try-building-a-new-model-for-china-us-ties.html?pagewanted=all&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/06/09/world/asia/obama-and-xi-try-building-a-new-model-for-china-us-ties.html?pagewanted=all&_r=0).

<sup>23</sup> <http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/us-china-summit-barack-obama-xi-jinping>.

untuk kembali meneruskan mekanisme regional yang dapat mengembalikan stabilitas keamanan di kawasan<sup>24</sup>.

Agenda pembicaraan lain yang juga dibahas dalam pertemuan ini walaupun tidak dapat dikatakan terdapat kesamaan pemahaman adalah masalah intelijen dunia maya (*cyberspionage*). Kedua pemimpin negara sama-sama memahami bahwa perkembangan teknologi masa kini dapat mengarah kepada peningkatan aktivitas intelijen di dunia maya. Walaupun Amerika Serikat mengindikasikan keberatannya atas tindakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh China, namun pada saat yang hampir bersamaan, Amerika Serikat juga meluncurkan proyek yang dijalankan oleh NASA yang juga memiliki potensi pelanggaran terhadap keamanan negara China. Dalam pembicaraan ini, Presiden Obama menjelaskan bahwa keberatan Amerika Serikat dalam kasus *cyberspionage* adalah pada perkembangan pelanggaran, termasuk ke area pelanggaran hak cipta dan kemungkinan gangguan ekonomi Amerika Serikat. Sementara, Presiden Xi menyesalkan adanya ketimpangan pelaporan media di Amerika Serikat terhadap kasus *cyberspionage* yang diduga dilakukan Amerika Serikat terhadap China.

Kesimpulan yang dapat disarikan dari pertemuan informal ini adalah kedua pemimpin negara berusaha membuka jalur komunikasi dan membangun kepercayaan antara satu dengan yang lain. Walaupun forum ini juga mungkin digunakan untuk menunjukkan proyeksi bahwa kedua pemimpin negara tetap percaya diri dan berusaha memaksimalkan kepentingan nasional masing-masing, namun indikasi terbentuknya pola hubungan yang lebih konstruktif dibandingkan konfrontasi antara Amerika Serikat dan China di masa depan juga tergambar dengan jelas.

## PENUTUP

Secara tradisional, pola yang mungkin tercipta dalam hubungan internasional, baik di tingkat bilateral, regional maupun global adalah pola kompetisi atau hubungan kerja sama. Berdasarkan penjelasan dari beberapa peristiwa yang terjadi selama kuartal ketiga tahun

---

<sup>24</sup> *ibid.*

2013 tampaknya pola kompetisi masih cenderung lebih dominan. Walaupun demikian, beberapa usaha untuk meningkatkan kerja sama juga tetap ada, namun tetap terkesan rutin tanpa hasil akhir yang cukup signifikan seperti pertemuan tingkat Menteri ASEAN. Secara umum, pola kompetisi cenderung membangun dunia yang kurang stabil keamanannya dan pola kerja sama cenderung membentuk dunia yang lebih damai. Atas pertimbangan tersebut, maka sebaiknya Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan dunia yang lebih tidak stabil keamanannya, sembari tetap berusaha sekuat tenaga untuk membangun dunia yang lebih damai.